



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. NAHIRUDDIN MALLE  
2. Jabatan : HAKIM TINGGI  
3. NHK : 68337

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/140 m2 di KOTA MAKASAR BARAT , WARISAN Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/300 m2 di BARRU, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 12313 m2 di BARRU, WARISAN Rp. 175.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/40 m2 di BARRU, WARISAN Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 8479 m2 di BARRU, WARISAN Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1400 m2 di BARRU, WARISAN Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 1790 m2 di BARRU, WARISAN Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 35.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 8.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 334.506

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.643.334.506

**III. HUTANG**

Rp. 239.100.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.404.234.506

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.